

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada awal tahun 2020 dihadapkan dengan penyebaran virus *corona*. Virus *corona* tersebut sudah menjadi masalah bagi pemerintah secara nasional maupun global. Indonesia merupakan salah satu negara yang angka penularannya tinggi, di mana penyebaran virus tersebut sangat cepat dan penularannya melalui kontak fisik secara langsung melalui mata, hidung dan mulut. Munculnya virus tersebut mengharuskan pemerintah membentuk sebuah kebijakan maupun peraturan yang harus ditaati bagi seluruh masyarakat sebagai bentuk partisipasi guna menurunkan angka penularan yang ada. Penyebaran virus covid-19 yang sangat cepat tersebut membuat pemerintah membentuk berbagai upaya guna mengantisipasi, mengatasi serta menghentikan penyebaran virus covid-19 yang semakin meluas.

Salah satu kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk menghentikan penularan virus covid-19 yang harus ditaati setiap daerah yaitu kebijakan berupa penerapan protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat ketika berada di ruang terbuka. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran virus covid-19, pemerintah meminta kepada setiap provinsi, kota maupun daerah untuk membuat peraturan provinsi ataupun peraturan daerah untuk menangani penyebaran covid-19 berdasarkan kebijakan yang telah dibentuk.

Pemerintah kota Yogyakarta telah membentuk peraturan daerah terkait virus covid-19 berupa PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NO.51 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE-19 PADA MASA TATANAN NORMAL BARU DI KOTA YOGYAKARTA (sumber : <http://birohukum.jogjaprovo.go.id/>).

Penerapan terhadap beberapa peraturan wali kota Yogyakarta di atas terkait pencegahan penularan covid-19 dilakukan di setiap kalangan baik itu pemerintah maupun masyarakat sekalipun. Dalam peraturan tersebut terdapat poin-poin yang perlu dilakukan guna meminimalisir penyebaran covid-19. Oleh sebab itu dengan adanya kebijakan tersebut langkah selanjutnya yaitu melaksanakan kebijakan tersebut sehingga dapat menimbulkan dampak yang tercapai atau tidaknya suatu kebijakan dengan memanfaatkan sarana yang ada dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Penerapan kebijakan terhadap protokol kesehatan yang dibentuk pemerintah tersebut guna menekankan angka peningkatan penularan virus covid-19 yang ada. Kebijakan tersebut dibentuk agar diterapkan oleh semua kalangan masyarakat yang ada sehingga mampu meminimalisir penyebaran virus covid-19 di wilayah tersebut. kebijakan dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan baik apabila masyarakatnya patuh. Kepatuhan menurut (Andaers, 2009) yaitu merupakan sikap atau perilaku individu yang bersangkutan dalam mentaati dan mematuhi sebuah atauran yang ada (Widyaningrum, Putri, & Wilopo, 2020).

Menurut (Santoso & Santosa, 2020) Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara nyata akan berdampak langsung terhadap tempat-tempat umum yang sering dikunjungi bagi masyarakat. Tempat-tempat umum tersebut seperti pasar, tempat hiburan dan rekreasi, tempat wisata, swalayan dan tempat lain yang memungkinkan adanya orang berkumpul.

Tempat-tempat tersebut mulai dibatasi dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.

Ruang terbuka yang banyak dikunjungi oleh masyarakat antara lain yaitu tempat wisata, pasar, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Kebijakan terkait protokol kesehatan tersebut menjadi salah satu pedoman masyarakat berupa perilaku hidup baru pada masa pandemi covid-19. Berdasarkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, penggunaan masker, serta menjaga jarak diruang publik menjadi salah satu peranan penting bagi setiap orang untuk menekan angka penyebaran virus covid-19 diwilayah tersebut (Sembiring, R & Suryani, D. E. (2020:16)).

Diawal ditetapkannya pandemi covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hemengkubwana X mengeluarkan peraturan terkait covid-19 yaitu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dikawasan wisata salah satu wilayah atau tempat umum yang berdampak dari munculnya wabah virus covid-19 ini yaitu kawasan wisata malioboro. Sri Sultan Hemengkubwana X mengatakan akan menutup kawasan wisata malioboro apabila masyarakatnya mengabaikan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Selain itu pemerintah Kota Yogyakarta juga telah menerapkan aplikasi pendataan pengunjung dengan melakukan scan barcode yang telah diletakan disetiap zona di Malioboro. Oleh sebab itu pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan peraturan berupa Peraturan wali kota Kota Yogyakarta No. 51 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian *corona virus disease-19* pada masa tantangan normal baru di Kota Yogyakarta.

Penggunaan masker diruang publik disaat pandemi covid-19, merupakan salah satu langkah yang sangat penting dan sangat disarankan sebagai salah satu tujuan untuk melindungi diri sendiri ataupun masyarakat yang ada disekeliling kita. Hal tersebut berguna untuk menurunkan tingkat risiko agar tertular dari wabah virus covid-19 ini (Pratiwi, 2020). Dalam penerapan Peraturan wali kota Yogyakarta dalam menerapkan protokol kesehatan

yaitu 4 M, banyak masyarakat yang mentaati peraturan tersebut. Namun masih ada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan tersebut, bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan terdapat beberapa sanksi seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, sanksi sosial dan denda.

Kawasan wisata Malioboro setiap harinya mampu menampung banyak wisatawan asing maupun wisatawan domestik serta masyarakat lokal. Kawasan Malioboro merupakan pusat bagi pengunjung ataupun masyarakat lokal untuk membeli kebutuhan atau hanya sebagai tempat wisata. Di mana dikawasan wisata Malioboro tersebut mencakup banyak sekali lokasi tempat perbelanjaan seperti mall, toko cendra mata, pedagang kaki lima yang menjual oleh-oleh ataupun menjajakan makanan disekitaran kawasan tersebut, hingga pasar tradisional bringhardjo. Tempat-tempat umum tersebut Kawasan wisata ini menjadi salah satu tempat yang terdapat perkumpulan masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga pengunjung tidak mampu menerapkan protokol kesehatan berupa pembatasan sosial ataupun pembatasan fisik satu sama lain. Namun dalam penggunaan masker dan mencuci tangan para pengunjung maupun masyarakat dapat menerapkan kebijakan tersebut dengan baik.

Berdasarkan data terbaru mengenai kasus virus covid-19 di wilayah Kota Yogyakarta per tanggal 23 februari 2021 sesuai dengan suspek kumulatif berdasarkan per kecamatan mencapai total sebanyak 2321 orang. Berdasarkan konfirmasi pasien covid-19 di Kota Yogyakarta per 23 februari 2021 pada jam 12:00 menyarakan bahwa pasien yang terkonfirmasi sebanyak 300 orang, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 3989 orang dan pasien yang meninggal sebanyak 212 orang. (sumber : <https://corona.jogjakota.go.id/>)

Berdasarkan uraian di atas tersebut peneliti tertarik untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan dikawasan wisata Malioboro. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memutuskan memilih

pemerintah yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut serta masyarakat ataupun pengunjung yang berada dikawasan wisata Malioboro sebagai terget untuk memperoleh informasi terhadap pendapat mereka mengenai implementasi kebijakan dalam menjalankan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 sebagai bentuk partisipasi masyarakat menurunkan angka penularan virus tersebut. oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukanlah penelitian. Judul yang dibuat oleh peneliti yaitu **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta No.51 Tahun 2020 (Studi Kasus : Di Kawasan Wisata Malioboro)”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan paparan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Peraturan Wali Kota Yogyakarta No.51 Tahun 2020 Dalam Penerapan Protokol Kesehatan Dikawasan Wisata Malioboro Pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Terkait Penerapan Protokol Kesehatan Tersebut.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah telah melaksanakan implementasi terhadap kebijakan berupa penerapan protokol kesehatan pandemi covid-19 di kawasan wisata malioboro. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan apa saja yang mampu menghambat pengimplementasian kebijakan tersebut.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoretis

- 1) Memberikan informasi mengenai pandangan masyarakat tentang kebijakan protokol kesehatan sebagai bentuk pemutus penularan virus saat ini.
- 2) Memberikan informasi terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam mentaati aturan terhadap kebijakan berupa protokol kesehatan ketika berada diluar.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi terhadap penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam melihat pelaksanaan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah.

b. Manfaat praktis

Agar menjadi bahan rujukan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang mengunjungi kawasan wisata malioboro dalam mengantisipasi dan memberantas angka meningkatnya pasien covid-19 diwilayah tersebut dengan selalu mentaati kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mampu bertanggung jawab dengan selalu menerapkan prilaku hidup baru pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan berupa penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak antara satu orang dengan orang lainnya dan mengurangi kontak fisik lainnya dan menghindari kerumunan. Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan untuk menghentikan penularan virus tersebut. Namun saat ini masyarakat merupakan pemeran penting dalam memutus rantai penularan dengan mentaati peraturan yang ada.

D. Literatur review

No.	Nama penulis	Judul	Keterangan
1.	(Sembiring & Suryani, 2020)	Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi Dengan Pembagian Masker	Saat ini pemerintah mengantisipasi dampak dari penyebaran virus corona melalui berbagai kebijakan dengan membentuk sebuah Gugus Tugas

No.	Nama penulis	Judul	Keterangan
		Kesehatan Kepada Para Pedagang Dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan	Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh presiden Jokowi pada tanggal 13 maret 2020. Pemerintah pada masa pandemi tersebut menganjurkan kepada masyarakat untuk beradaptasi akan kebiasaan baru dengan melakukan Gerakan 3 M. Gerakan 3 M tersebut terdiri dari memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Hal tersebut dijadikan sebagai salah satu bentuk untuk memutus rantai penularan covid-19 dimasyarakat.
2.	(Tuwu, 2020)	Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19	Dalam memutus rantai penularan covid-19 yang semakin meluas, masyarakat membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat untuk mencegah dan mengatasi virus Corona ini. Kebijakan yang diperlukan yaitu untuk mengatasi berbagai dampak yang terkena akibat munculnya virus tersebut seperti dampak sosial, psikologis, pariwisata, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Menurut (Suharto, 2008) mengatakan bahwa Kebijakan (<i>policy</i>) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik. Sedangkan (Bridgeman, 2004) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan
3.	(Akib, 2012)	Implementasi kebijakan: apa,	Implementasi kebijakan dibutuhkan untuk melihat

No.	Nama penulis	Judul	Keterangan
		mengapa dan bagaimana	kepatuhan bagi kelompok sasaran kebijakan. Implementasi tersebut dilihat berdasarkan perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. selain itu implementasi kebijakan akan menentukan dampak maupun pengaruh terhadap masyarakat.
4.	(Atmojo, et al., 2020)	Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19: Rasionalitas, Efektivitas, Dan Isu Terkini	Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control/CDC) Amerika Serikat dan WHO (World Health Organization) telah merekomendasikan pemakaian masker kain untuk masyarakat umum, hal ini diikuti oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Penggunaan masker dilaporkan akan efektif dalam membatasi penyebaran Covid19 yang relatif berhasil di Taiwan (Eikenberry, 2020; Wang, 2020).
5.	(Paramita & Putra, 2020)	New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid-19	Dalam industri pariwisata mengalami banyak perubahan pada masa pandemi, di mana para sektor pariwisata diharuskan untuk mengutamakan penerapan standar protokol kesehatan demi menjaga kenyamanan para wisatawan yang berkunjung.
6.	(Ganing, Salim, & Muslimin, 2020)	Studi Literatur : Pengetahuan Sebagai Salah Satu Faktor Utama Pencegahan Penularan Covid-19	Upaya untuk menghindari penularan covid-19 yaitu dengan melakukan upaya pencegahan oleh diri sendiri sebisa mungkin dengan melakukan beberapa protokol kesehatan seperti penggunaan masker, cuci tangan dan menjaga jarak antara masyarakat sekitar. upaya tersebut adalah sebuah bentuk perilaku yang secara sadar harus dilakukan oleh masyarakat.
7.	(Kristiana, 2020)	Pemulihan Ekonomi Pariwisata Bali di Era New Normal	Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah semakin menyebarnya virus covid-19 yaitu dengan menutup sementara

No.	Nama penulis	Judul	Keterangan
			sektor pariwisata. Akibat dari ditutupnya sektor pariwisata, sektor ekonomi juga mengalami dampak tersebut. selain itu pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan-kebijakan lain terkait hidup baru yaitu hidup berdampingan dengan covid-19.
8.	(Bascha, Reindrawati, Witaningrum, & Sumardiko, 2020)	Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Minat Masyarakat dalam Berwisata dan Sosialisasi Penerapan Protokol New Normal Saat Berwisata	Berdasarkan keputusan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pada awal bulan agustus tahun 2020 mengeluarkan paduan protokol kesehatan pada sektor pariwisata yang harus ditetapkan pada masa pandemi covid-19 dalam melakukan pembukaan sektor wisata ataupun bagi para masyarakat yang akan melakukan perjalanan wisata agar tetap memperhatikan protokol kesehatan diri sendiri.
9.	(Wiryawan, 2020)	Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia	Wabah covid-19 merupakan pandemi berskala global yang dirasakan dunia. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undang baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait pandemi covid-19 tersebut. pelaksanaan wewenang terhadap kebijakan-kebijakan tersebut harus disertai pertimbangan-pertimbangan terhadap langkah maupun akibat yang akan timbul. Kebijakan yang dibuat tersebut diharapkan mampu mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia.
10.	(Syapitri, Siregar, & Saragih, 2020)	Pencegahan Penularan Covid-19 Melalui Sosialisasi Dan Pembagian Masker Di Pasar Pringgane Medan	Imbauan bagi masyarakat agar mengenakan masker dan memperhatikan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah masih sering diabaikan oleh sebagian masyarakat. Seperti masih terdapatnya masyarakat yang tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tidak sesuai dengan ketentuan yang

No.	Nama penulis	Judul	Keterangan
			ada. sebagian masyarakat tersebut masih belum memahami pentingnya menggunakan masker sebagai bentuk pemutus penyebaran virus covid-19.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas. pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan terhadap penerapan peraturan yang dibuat oleh pemerintah berupa penerapan protokol kesehatan disaat pandemi covid-19 saat ini. Pemerintah mengharapkan kepada masyarakat agar mampu beradaptasi dengan hidup berdampingan dengan covid-19. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu lebih memfokuskan menjelaskan mengenai sosialisasi maupun efektifitas terhadap penggunaan masker serta menjaga jarak satu sama lain. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 saat ini.

Pada persamaan beberapa penelitan terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu peneliti sama-sama menjelaskan terhadap bagaimana penyebaran virus covid-19 di kalangan masyarakat. Peneliti menyebutkan bahwa masyarakat harus selalu menerapkan protokol kesehatan di mana pun mereka berada seperti selalu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter dan menjauhi kerumunan. Selain itu peneliti juga menyebutkan bahwa setiap pemerintah provinsi maupun kota harus membuat peraturan mengenai penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat agar tidak tetular virus covid-19.

Penelitian yang dilakukan saat ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru bahkan manfaat yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan memberikan informasi terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan solusi dari permasalahan yang sedang berlangsung dilingkungan masyarakat yaitu terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus covid-19. Selain itu, implementasi kebijakan yang

dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan mampu memberikan perubahan yang nyata di kehidupan masyarakat terhadap virus covid-19 yang sedang berlangsung, seperti menurunnya tingkat pasien positif covid-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjalankan gaya hidup sehat. Selain itu penelitian ini juga melihat faktor-faktor apa saja yang mampu mendukung maupun menghambat terlaksananya kebijakan tersebut dikawasan wisata Malioboro.

E. Kerangka Teori

1. Implementasi kebijakan

a. Definisi Implementasi kebijakan

Menurut (James, P. Lester & Joseph Steewart, 2000: 104) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum yang didalamnya terdapat berbagai aktor, organisasi, prosedur serta teknik yang saling bekerja sama dalam menjalankan kebijakan yang ada sehingga mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan dalam (Kiwang, 2018). Implementasi juga dapat dikatakan sebagai fenomena yang kompleks dipahami berdasarkan adanya proses, keluaran (output) hingga hasil. Pembatasan implementasi kebijakan menurut (Van Meter & Van Horn, 1975) yaitu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu yang merupakan (alat kelompok-kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam kebijakan-kebijakan terdahulu. Tindakan yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dengan kurun waktu tertentu agar mencapai perubahan-perubahan baik berskala besar maupun kecil berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan.

Implementasi adalah apa yang dilakukan didasarkan keputusan yang telah dibuat. Menurut Grinde dalam (Winarno, 2007) menyebutkan bahwa implementasi

bertugas membentuk suatu kaitan yang dapat memudahkan tujuan kebijakan mampu direalisasikan sebagai dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Pengimplementasian kebijakan tersebut dilaksanakan guna mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, namun apabila pengimplementasian tersebut dapat terdapat kesalahan maka hal tersebut berasal dari analisis kebijakan. Dalam melaksanakan implementasi sebuah kebijakan terdapat beberapa aktor yang terlibat didalamnya antara lain birokrasi, badan-badan administrasi, lembaga legislatif, lembaga peradilan, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan organisasi masyarakat.

Penetapan implementasi kebijakan menurut (Budi Winarno, 2007: 102) menyebutkan bahwa tahapan dalam menjalankan implementasi terjadi ketika undang-undang telah ditetapkan dan tersedianya dana untuk membiayai jalannya implementasi kebijakan tersebut dalam (Kiwang, 2018).

Berdasarkan kamus Webster menurut (Solichin, 2004: 64) merumuskan bahwa implementasi yaitu menyediakan sebuah sarana guna menjalankan sesuatu dan menimbulkan dampak terhadap sesuatu seperti tindakan yang dipilih oleh pemerintah baik dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Implementasi kebijakan yaitu penerapan dari kebijakan publik yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengkajian terhadap implementasi kebijakan perlu dilaksanakan agar memenuhi proses tersebut berjalan sesuai dengan tujuan atau memiliki dampak terhadap kebijakan. Implementasi merupakan aspek penting terhadap proses yang menghasilkan output (Solichin, 2004: 59).

Pelaksanaan kebijakan memiliki peranan penting dibandingkan pembuatan kebijakan tersebut. menurut Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier dalam (Solichin, 2004:65) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan

jawaban bagi masalah yang sedang berlangsung di kalangan masyarakat guna memahami peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang muncul setelah ditetapkannya kebijakan tersebut sehingga memberikan dampak tertentu terhadap masyarakat. Menurut (Budi Winarno, 2007: 72) proses implementasi terdapat variabel maupun faktor yang membentuk kaitan antara kebijakan dan pencapaian di mana variabel tersebut terbagi menjadi 2 yaitu variabel bebas dan variabel yang saling berhubung satu sama lain.

Beberapa teori implementasi kebijakan yang mampu dijadikan sebagai tolak ukur sebuah kebijakan antara lain yaitu :

1) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini disebut juga sebagai teori kerangka analisis implementasi. Di mana didalam proses implementasi terdapat tiga variabel pengukur yaitu variabel independen, variabel interveting dan variabel dependen.

2) Teori George C. Edward

Dalam (Nugroho, 2009) George Edward III menyebutkan bahwa masalah utama dalam administrasi publik berupa kurangnya perhatian terhadap persoalan implementasi kebijakan. Tolak ukur dalam membuat implementasi kebijakan menjadi efektif terdapat beberapa variabel yang perlu diperhatikan yaitu komunikasi, sumber daya, komitmen dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi yaitu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan mengharuskan para aktor mengetahui apa saja yang perlu dilakukan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan mampu diteruskan kepada kelompok sasaran.

b) Sumber daya, yaitu berhubungan dengan tersedianya sumber daya pendukung, berupa sumber daya manusia. Di mana sumber daya memiliki

peranan penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan agar berjalan secara efektif.

- c) Komitmen, yaitu berupa watak dan karakteristik yang dimiliki oleh aktor atau implementator seperti sifat demokratis, jujur dan memiliki komitmen yang baik. Maka aktor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan harapan si pembuat kebijakan. Namun jika sebaliknya maka proses implementasi kebijakan berjalan dengan tidak efektif.
- d) Struktur birokrasi, yaitu berkaitan dengan organisasi birokrasi yang akan melaksanakan implementasi kebijakan publik tersebut. dalam pengimplementasian kebijakan tersebut diharapkan sesuai dengan aspek struktur organisasi yaitu SOP (standard operating procedure) dan fragmentasi agar tidak terjadinya hambatan dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut.

3) Teori Merilee S Grindle

Dalam (Subarsono, 2011: 93) menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar didalamnya yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Kedua variabel tersebut mencakup terkait sejauh mana kelompok kepentingan sasaran atau tujuan target termuat dalam isi kebijakan serta jenis manfaat yang akan diterima oleh target grup. Melihat sejauh mana perubahan yang diharapkan dari adanya sebuah kebijakan, melihat penerapan sebuah program yang sudah tepat atau tidak, kebijakan telah menyebutkan implementator secara rinci dan melihat apakah program atau kebijakan tersebut telah didukung sumber daya yang sudah memadai atau tidak dan lain sebagainya.

Menurut Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) menyebutkan dalam teori Grindle ditentukan berdasarkan isi kebijakan hingga konteks implementasi. Implementasi kebijakan dapat dilakukan apabila kebijakan telah ditransformasikan. Isi kebijakan mencakup beberapa hal yaitu : kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan.

- a) Jenis manfaat yang dihasilkan
- b) Derajat perubahan yang diinginkan
- c) Kedudukan pembuat kebijakan
- d) Aktor pelaksana program
- e) Sumber daya yang dihasilkan

Selain itu, konteks implementasi mencakup :

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap

2. Konsep kebijakan pemerintah

Menurut Friedrich dalam (Widodo 2007:13) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Handoyo, 2012).

Kebijakan pemerintah yaitu keputusan yang diperbolehkan atau dilarang berdasarkan alasan-alasan yang dipertimbangkan (Keban, 2008). Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang ditentukan dan dibentuk oleh pelaku-pelaku politik dalam memilih cara dan tujuan agar tercapainya tujuan tersebut. kebijakan diartikan sebagai sebuah tindakan terarah yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan pertimbangan yang mencakup aturan berupa asas dan norma tertentu guna

menyelesaikan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Beberapa para ahli berpendapat serta mendefinisikan mengenai kebijakan pemerintah antara lain yaitu :

a. Mc Rae dan Wilde

Menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yaitu menyusun tindakan-tindakan yang akan dipilih oleh pemerintah yang pengaruhnya sangat berdampak bagi orang banyak. Namun apabila pemilihan tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut hanya menyangkut atas nama perorangan saja, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah.

b. Young dan Quiin

Mendefinisikan kebijakan pemerintah merupakan tindakan yang dibentuk oleh pemerintah dan di implementasikan oleh badan yang memiliki kewenangan didalamnya. Kebijakan tersebut dibentuk dan dijalankan oleh lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Implikasi yang diperoleh terhadap adanya kebijakan pemerintah tersebut antara lain yaitu :

- 1) Kebijakan pemerintah dibentuk berdasarkan tindakan-tindakan pemerintah.
- 2) Tindakan tersebut bersifat mengikat dan dialokasikan kepada masyarakat.
- 3) Tindakan-tindakan pemerintah tersebut berasal dari lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan akan politik, hukum dan finansial.
- 4) Tindakan yang diambil oleh pemerintah tersebut dimanfaatkan untuk menekankan masalah yang sedang terjadi dilingkungan masyarakat.
- 5) Tindakan yang dibentuk tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu.

- 6) Kebijakan pemerintah tersebut diorientasikan agar terpenuhinya kepentingan masyarakat maupun kepentingan publik.

3. Protokol kesehatan

Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (COVID-19). Pemerintah mengharapkan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru disaat pandemi berlangsung terutama ketika berada diluar rumah ataupun ditempat umum. Penerapan protokol kesehatan diterapkan dilingkungan masyarakat sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian terhadap virus covid-19 (sumber : <http://hukor.kemkes.go.id/>).

Risiko pergerakan serta berkumpulnya masyarakat di berbagai fasilitas umum merupakan salah satu potensi terjadinya penularan virus covid-19 yang cukup besar. Masyarakat dihadapkan akan perubahan pola hidup dengan menerapkan kebiasaan baru agar terhindar dari penularan virus covid-19.

Protokol kesehatan yang harus diterapkan secara umum sebagai perlindungan kesehatan individu yaitu :

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu, dan digunakan ketika berada diluar rumah dan ketika melakukan interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
- b. Rajin membersihkan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun seta air mengalir maupun menggunakan cairan antiseptik. Serta menghindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang memungkinkan terkontaminasi dengan virus).

- c. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain guna menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, maupun bersin, dan menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan.
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti melakukan olahraga, istirahat yang cukup, dan lain sebagainya.

F. Definisi Konseptual

Berdasarkan uraian teori-teori yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan sebuah kebijakan agar mencapai target atau tujuan terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan berbagai pemikiran terkait rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar hingga menjadi dasar dari rencana dalam pelaksanaan sebuah kepemimpinan hingga cara bertindak untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran yang ingin dicapai.
2. Implementasi kebijakan menurut Merile S. Grindle sebagai upaya menciptakan keterkaitan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik tersebut dapat terwujud sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Secara garis besar, kebijakan publik berisi mengenai tujuan atau sasaran dan sarana-sarana pencapaian. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang ada perlu diterjemahkan kedalam program atau rencana aksi yang lebih spesifik sehingga tujuan atau sasaran yang terdapat di dalam kebijakan tersebut dapat terwujud. Implementasi kebijakan menurut Merile S. Grindle, terdiri dari isi kebijakan dan konteks implementasinya. Pada dasarnya setelah kebijakan di formulasikan maka setelahnya implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.
3. Protokol kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mencegah tertularnya virus covid-19 dengan melakukan gerakan 4 M yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jara sejauh 1 meter antara satu sama lain dan menjauhi kerumunan. Selain itu, protokol kesehatan yang dibutuhkan yaitu menerapkan upaya perlindungan kesehatan

dikalangan masyarakat yang harus dilakukan secara komprehensif guna memutus rantai penyebaran yang semakin tinggi.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan konsep data yang telah diteliti secara empiris maka konsep-konsep tersebut diharuskan mendefinisikan kembali dengan menggunakan cara mengubah menjadi variabel yang memiliki nilai antara lain yaitu:

1. Indikator Implementasi Kebijakan

a. Isi kebijakan

- 1) Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, yaitu mengenai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Indikator ini menyebutkan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan.
- 2) Tipe manfaat, yaitu bertujuan menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menghasilkan dampak positif pada implementasi kebijakan yang dilaksanakan.
- 3) Derajat perubahan yang ingin di capai, yaitu sebuah kebijakan memiliki target yang ingin di capai. Tipe ini menjelaskan sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan dengan skala yang jelas.
- 4) Letak pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh sebab itu, poin ini menjelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan yang akan di implementasikan.
- 5) Pelaksana program, yaitu adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan berkemampuan demi keberhasilan sebuah kebijakan.
- 6) Sumber-sumber daya yang digunakan, yaitu adanya dukungan dari sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan kebijakan bisa berjalan dengan baik.

b. Lingkungan implementasi

- 1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, yaitu dibutuhkan pertimbangan yang akan digunakan oleh aktor yang terlibat agar memperlancar jalannya suatu implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa, yaitu mengenai lingkungan yang menjadi tempat dilaksanakannya kebijakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan. Poin ini menekankan mengenai karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, yaitu terkait sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

2. Indikator Implementasi

- a. Komunikasi, yaitu proses menyampaikan informasi yang disampaikan oleh pihak yang mengirim pesan atau komunikator kepada pihak yang menerima pesan atau komunikan.
- b. Sumber daya, unsur yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan seperti sumber daya manusia, anggaran, peralatan dan lain sebagainya.
- c. Disposisi, yaitu merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan mampu diwujudkan.
- d. Struktur birokrasi, yaitu pihak pelaksana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Indikator Kebijakan

- a. Policy output
 - 1) Cakupan yaitu digunakan untuk menilai sejauh mana kelompok sasaran mampu di jangkau melalui kebijakan publik yang telah di implementasikan.

- 2) Bias, yaitu indikator yang digunakan untuk menilai pelayanan yang di berikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang di berikan pemerintah melalui kebijakan yang ada.
 - 3) Akses, yaitu digunakan untuk melihat apakah kebijakan yang di buat bisa di jangkau dengan mudah oleh kelompok sasaran. Akses tersebut juga tidak terdapat diskriminasi bagi individu atau kelompok yang terlibat untuk menikmati manfaat yang diberikan oleh sebuah kebijakan.
 - 4) Kesesuaian program dengan kebutuhan, yaitu digunakan untuk melihat apakah kebijakan yang di keluarkan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.
- b. Policy outcomes
- 1) Inital outcome (hasil langsung dari kebijakan)
 - 2) Intermediate outcome (hasil jangka menengah dari kebijakan)
 - 3) Long-trem outcome (hasil jangka panjang dari kebijakan)
4. Indikator Protokol Kesehatan
- a. Perorangan
- 1) Mencuci tangan
 - 2) Menggunakan masker
 - 3) Menjaga jarak
 - 4) Menjauhi kerumunan
- b. Perlindungan kepada masyarakat
- 1) Kegiatan promosi kesehatan (promote) yang dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat

- 2) Kegiatan perlindungan (protect) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer. upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.
- 3) Wajib menggunakan masker.
- 4) Memastikan suhu tubuh tidak melebihi 37,5°C dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh/*thermal gun*.
- 5) Penyediaan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk ruangan dan *lift*.
- 6) Penyediaan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di ruangan terbuka (halaman kantor/area publik).
- 7) Pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam *lift*.
- 8) Pengaturan alur keluar dan masuk serta penanda *physical distancing* dalam kantor/tempat kerja/area publik.
- 9) Desinfeksi secara *reguler*/rutin terhadap sarana (seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol *lift*, mesin absensi, ruang pertemuan, dan lain-lain), prasarana kerja, alat tulis kantor, serta perlengkapan pribadi lainnya yang dipergunakan selama bekerja di kantor.

H. Metode Penelitian

Menurut (Mulyana, 2010 : 145) metodologi adalah suatu pendekatan umum guna mengkaji penelitian. Metodologi merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan

untuk mendekati masalah hingga mencari jawaban terkait masalah tersebut (Nurhidayah, 2015).

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif di mana pada penelitian tersebut lebih menekankan kepada fenomena yang sedang berlangsung di lingkungan masyarakat. Menurut Moleong (2010 : 6) dalam (Haikal, 2020) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena terhadap apa yang dialami subjek penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), di mana peneliti langsung turun kelapangan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam sebuah keadaan ilmiah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di dinas kesehatan, satuan polisi pamong praja dan kawasan wisata malioboro, Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan dikawasan ini dikarenakan malioboro merupakan kawasan wisata yang dekat dengan kota. sehingga kawasan ini lebih banyak didatangi oleh pengunjung dibandingkan destinasi wisata yang lain. Selain itu, rata-rata pengunjung kawasan malioboro berkisaran ± 2.000 orang per harinya. (sumber berita: <https://travel.kompas.com/>) Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021 hingga 12 Maret 2021.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu :

a. Data primer

Menurut wijaya (2013:5) data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung namun data tersebut masih bersifat masih baku atau mentah, sehingga belum mampu memberikan informasi dalam mengambil keputusan terkait penelitian yang perlu diolah lebih lanjut. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil

wawancara yang dilakukan kepada para responden untuk melihat tanggapan mereka terkait kebijakan pemerintah dalam menggunakan masker untuk mencegah penularan covid-19 di kawasan wisata malioboro.

Data tersebut diperoleh melalui pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini melalui hasil wawancara dan observasi diantaranya yaitu dinas kesehatan, dinas pariwisata dan pengunjung kawasan wisata malioboro.

Sasaran	Teknik pengumpulan data	Sumber data
Pendapat pemerintah terkait Implementasi kebijakan pemerintah No.51 tahun 2020	Wawancara	a. Kepala Dinas Kesehatan b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Persepsi masyarakat terkait implementasi kebijakan pemerintah No.51 tahun 2020 terkait covid-19	Wawancara	a. Pengunjung

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2013) data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, data sekunder diperoleh dengan cara melakukan dokumentasi seperti sumber datanya dari literature review, jurnal, koran, buku-buku dan lain-lain. Pada data ini peneliti membutuhkan data sekunder dari jurnal-jurnal terkait persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penggunaan masker sebagai bentuk pencegahan penularan virus pada masa pandemi covid-19 dikawasan wisata malioboro.

Data yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan studi pustaka dari kantor dinas atau wabsite resmi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

Sasaran	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
Kebijakan pemerintah terkait Peraturan wali kota Yogyakarta No.51 Tahun 2020 terkait virus Covid-19	Dokumen	Website resmi pemerintah
Jumlah data pasien covid-19.	Dokumen	Website resmi pemerintah
Jumlah pengunjung malioboro.	Dokumen	Website resmi pemerintah

4. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara yang digunakan oleh peneliti agar mendapatkan dan memperoleh data yang nyata terkait penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab terhadap subjek penelitian. Selain itu wawancara dapat dilakukan tanpa melakukan tatap muka namun memanfaatkan teknologi komunikasi didalamnya. Wawancara digunakan untuk memperoleh data secara mendalam terhadap isu yang diangkat dalam penelitian. Menurut (Yunus, 2010: 358) menjelaskan bahwa wawancara harus melalui beberapa tahapan yaitu memperkenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi wawancara hingga mengajukan pertanyaan.

Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara kepada Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong praja.

b. Observasi

Observasi yaitu merupakan kegiatan penelitian dengan menggunakan pancaindra, berupa penglihatan, pendengaran, dan penciuman dalam memperoleh

informasi yang dibutuhkan guna menjawab masalah penelitian. Observasi dilakukan guna memperoleh hasil yang nyata terhadap sebuah peristiwa kejadian yang sedang berlangsung dilingkungan masyarakat.

Menurut Bungin (2007: 115-117) menyebutkan beberapa bentuk observasi antara lain yaitu :

- 1) Observasi partisipasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan terlibat langsung dalam keseharian informan melalui pengamatan dan penginderaan.
- 2) Observasi tidak terstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa adanya pedoman dari observasi. Oleh sebab itu peneliti lebih mengembangkan berdasarkan pengamatannya dengan perkembangan yang terjadi dilapangan.
- 3) Observasi kelompok, penelitian yang dilakukan sekelompok tim peneliti terkait isu yang diangkat dalam penelitian.

Observasi yang dilakukan yaitu dengan melihat kontes yang akan diteliti seperti lokasi penelitian dengan memperhatikan hal-hal yang terlibat seperti memantau jumlah pengunjung kawasan wisata malioboro pada masa pandemi covid-19 saat ini dan lain sebagainya.

c. Dokumen

Dokumentasi yaitu informasi yang mampu diperoleh melalui fakta yang tersimpan baik secara tertulis maupun tercetak seperti surat, dokumen, arsip foto, jurnal kegiatan dan lain sebagainya sebagai salah satu bukti keterangan.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif, yaitu bentuk analisis yan dilakukan melalui gambaran hingga analisis terhadap data guna memberikan informasi serta pemahaman terkait pokok

permasalahan secara rinci dan sistematis. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dijabarkan melalui kata-kata atau kalimat sehingga memperoleh kesimpulan (Akmara, 2016).

Analisis kualitatif akan diperoleh sesuai data kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah itu, penganalisisan data objek yang diteliti dengan menjelaskan sesuai dengan dasar teori yang ada (Akmara, 2016).

Tahapan teknik analisis data yang akan digunakan terhadap penelitian ini yaitu diantaranya :

- 1) Reduksi data, yaitu merupakan proses menyeleksi, menganalisis, memfokuskan, menyederhanakan hingga memilih data untuk dijadikan rangkuman data. data tersebut diperoleh dari lapangan dan dirangkum membentuk laporan-laporan maupun informasi-informasi yang relavan terkait permasalahan sehingga dapat mendukung penelitian tersebut.
- 2) Penyajian data, yaitu merupakan informasi yang telah tersusun dan memberi kemungkinan adanya penyimpulan terhadap kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap penelitian yang dilakukan agar data lebih mudah dipahami.
- 3) Pengambilan atau penarikan kesimpulan, yaitu merupakan proses menganalisis serta menggabungkan informasi yang diperoleh dan disusun secara rinci untuk dapat dijadikan sebagai kesimpulan yang mengacu terhadap pokok permasalahan penelitian. Oleh sebab itu, peneliti akan dengan mudah melakukan proses terkait pengambilan hingga penarikan kesimpulan agar mampu menjawab pokok permasalahan penelitian dan mencapai tujuan dengan baik dan benar.